

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kondisi tatanan dunia saat ini mengalami pergeseran yang signifikan yang ditandai dengan melemahnya dominasi Barat. Lemahnya dominasi Barat memberikan efek kepada negara berkembang yang berada di kawasan *global south* memiliki kendali dalam berkontribusi aktif pada tatanan dunia saat ini. Kondisi ini dikenal dengan pergeseran tatanan dunia yang unipolar ke multipolar. Tatanan dunia unipolar merupakan suatu kondisi dalam tatanan dunia didominasi oleh satu negara atau kawasan yang memiliki *power*. Unipolar dalam tatanan dunia terjadi disebabkan dari kejadian pasca Perang Dingin yang dimenangkan oleh Amerika Serikat (Ikenberry, 2011a). Kemenangan ini membuat adanya dominasi Amerika Serikat dalam tatanan dunia sehingga menciptakan kondisi unipolar.

Runtuhnya Uni Soviet merupakan pertanda awal terbentuknya tatanan dunia unipolar, yang menyebabkan sistem internasional didominasi oleh satu negara pemenang Perang Dingin (Wohlforth, 1999). Munculnya sistem unipolar ini memberikan dampak pada terbentuknya sistem yang secara keseluruhan menempatkan dirinya memiliki kemampuan yang lebih unggul daripada negara lain. Hal ini tentunya memberikan peluang Amerika Serikat untuk memberikan citra di kancah dunia bahwa dia adalah negara *super power*. Dengan begitu,

menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang “kuat” berdiri di atas negara-negara lain dengan kemampuan material yang lebih unggul dan belum pernah terjadi sebelumnya yakni seperti kekuatan militer, teknologi, ekonomi, dan politik (Ikenberry, 2011b). Kemampuan seperti ini tentunya hanya menguntungkan bagi negara Amerika Serikat beserta sekutunya, yakni beberapa negara Barat, untuk mengatur sistem tatanan dunia. Sistem yang terbentuk ini memunculkan ketimpangan secara struktural yakni terdapat istilah negara bagian utara (*global north*) dan negara bagian selatan (*global south*). Sistem klasifikasi ini umumnya dianggap memisahkan negara-negara yang secara historis lebih miskin dan lebih kaya (Kenny, 2026) .

Munculnya ketimpangan secara struktural ini memberikan dampak ketidakadilan bagi negara selatan. Adanya sistem unipolar dalam tatanan dunia, tidak menjamin kedaulatan bagi negara selatan atas dominasinya Amerika Serikat. Dengan begitu, seiring berjalannya waktu memunculkan pergeseran tatanan dunia. Pergeseran tata dunia ini memunculkan istilah multipolar. Tatanan dunia multipolar adalah sebuah sistem dalam hubungan internasional di mana terdapat tiga atau lebih kekuatan besar yang memiliki pengaruh signifikan, berbeda dengan bipolaritas (dua kekuatan besar) dan unipolaritas (satu kekuatan dominan) (Stein, 2015). Hal ini menyebabkan konflik domestik pada negara selatan karena adanya intervensi dari luar. Kondisi ini menyebabkan banyaknya negara selatan ingin keluar dari ketidakadilan dengan sistem dunia yang terlalu didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya sehingga memunculkan gerakan-gerakan baru seperti pembentukan kerjasama.

Pembentukan suatu organisasi memberikan kemudahan bagi setiap negara untuk mencapai kepentingan nasional pada tingkat internasional. Organisasi internasional merupakan perjanjian secara formal yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mencapai kepentingannya. Tujuan utama dari kebanyakan aliansi adalah untuk menggabungkan kemampuan para negara anggota dengan cara mendorong kepentingan masing-masing, terutama tujuan keamanan mereka agar dapat terwujud (Walt, 2009). Hal ini sejalan dengan keinginan dari negara selatan untuk terlepas dari hegemoni Amerika Serikat dan Barat. Kondisi ini memunculkan kemandirian negara selatan sehingga membentuk suatu aliansi. Aliansi yang diinisiasi oleh negara selatan atau *global south* sudah mulai muncul sejak tahun 1955 yang ditandai dengan adanya pembentukan Konferensi Bandung dan pembentukan Gerakan Non-Blok (1961) serta G-77 (1964). Dalam hal ini tentunya merupakan langkah awal negara *global south* untuk dapat menunjukkan bahwa melalui prinsip, nilai, dan ide bersama yang menjadi dasar untuk tidak ikut blok Barat maupun Timur saat perang dingin serta melepaskan diri dari dekolonisasi (Pereira & Medeiros, 2015).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan kerjasama negara selatan semakin berkembang ditandai kemunculan aliansi BRICS. BRICS merupakan sebuah akronim dari kerjasama antar-negara yang terdiri negara Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Pada awalnya, BRICS hanya beranggotakan BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok). BRIC merupakan sebuah akronim kerjasama antar-negara lalu diresmikan sebagai forum kerjasama internasional dalam KTT BRIC yang berlangsung di Yekaterinburg, Rusia pada 16 Juni 2009.

Pada tahun 2010, BRIC melalui Tiongkok, mendaftarkan Afrika Selatan menjadi bagian dari mereka (Naidu, 2011). Dengan begitu, yang sebelumnya menggunakan akronim BRIC kini menjadi BRICS, karena bertambah anggota yakni Afrika Selatan (*South Africans*). Bertambahnya Afrika Selatan ke dalam aliansi BRICS, memberikan citra bahwa sebagai negara selatan dapat bergabung ke dalam aliansi besar.

Selain memberikan kesempatan bagi negara berkembang, dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan global, kehadiran BRICS menjadi penyeimbang dalam tatanan dunia global. Hal ini dikarenakan adanya kebangkitan negara-negara BRICS dan negara-negara berkembang lainnya (seperti Meksiko, Indonesia, Arab Saudi, dan Turki) sehingga terdapat pergeseran *power* dari utara ke selatan dalam perekonomian dunia saat ini (Li, 2019). Fenomena yang terjadi menjadi pertanda dapat memperlemah dominasi AS dan Barat dalam tatanan global. Sebelum adanya fenomena ini, AS dan Barat yang memiliki kendali atas hegemoni tatanan global. Dengan begitu, negara berkembang tidak memiliki kesempatan untuk dapat berkontribusi di dalamnya. Sedangkan negara-negara BRICS menyoroti kesetaraan antar negara, mempromosikan multipolaritas, demokrasi, pengambilan keputusan kolektif, dan supremasi hukum dalam hubungan internasional.

Eksistensi yang dibawa oleh BRICS mencerminkan keberpihakan negara berkembang di kancah internasional. Kehadiran BRICS memunculkan identitas dari negara anggota diantaranya keberagaman nilai, struktur politik, lokasi geografis, dan model pembangunan mereka serta adanya kesamaan identitas

sebagai negara berkembang (Nuruzzaman, 2020). Hal ini secara implisit menjelaskan bahwa visi misi aliansi BRICS yakni memperjuangkan hak negara berkembang agar mendapat tempat dalam proses membuat kebijakan sehingga menciptakan kesetaraan dan keadilan peran setiap negara. Melalui BRICS, hegemoni yang tercipta dalam tatanan global adalah kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan sehingga tidak terjadi dominasi didalamnya. Kondisi tersebut memberikan ketertarikan bagi negara selatan untuk bisa bergabung BRICS guna memenuhi kepentingan nasionalnya, salah satu negara selatan yang bergabung yakni Indonesia.

Pada rezim Presiden Joko Widodo (2023) Indonesia memberikan kesan tidak tergesa-gesa untuk langsung menerima tawaran bergabung ke dalam aliansi BRICS. Puncaknya, pada KTT BRICS ke-15, Indonesia menerima tawaran untuk bergabung dengan aliansi tersebut (Kemhan, 2025). Sehingga saat pergantian rezim, Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Luar Negeri, Sugiono, telah menerima tawaran untuk menjadi anggota penuh pada aliansi BRICS. Hal ini disampaikan oleh Sugiono pada KTT BRICS yang diselenggarakan di Kazan, Rusia pada bulan Oktober 2024. Melalui proses penantian yang panjang, Presiden BRICS yakni Brazil, menyatakan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota tetap BRICS pada 6 Januari 2025. Hal ini menjadi angin segar bagi Indonesia untuk memiliki peluang dapat berkontribusi dalam tatanan politik internasional.

Melalui penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bahwa keputusan luar negeri Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai strategis seperti identitas sebagai negara non-blok (tidak memihak blok manapun),

kemandirian, dan dapat berperan aktif dalam forum multilateral. Studi yang dikaji membahas mengenai pertimbangan Indonesia bergabung dalam keanggotaan BRICS yang membuka ruang untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi pedoman dalam merespons dinamika politik global. Dengan menggunakan pendekatan Teori Budaya Strategis, penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa Indonesia bergabung aliansi BRICS yang memiliki kaitan nilai, identitas nasional dan lain-lain yang mempengaruhi sikap Indonesia terhadap kebijakannya, serta bagaimana negara Indonesia berusaha mempertahankan citra strategisnya sambil tetap aktif berperan di kancah global.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini mempertanyakan : Mengapa Indonesia bergabung ke dalam aliansi BRICS?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BRICS dalam panggung internasional dengan menelaah perkembangan historis, posisi strategis, serta tantangan yang dihadapi BRICS dalam dinamika tatanan global.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk menjawab rumusan masalah mengenai motif Indonesia bergabung dalam aliansi BRICS yang ditinjau melalui

Teori Budaya Strategis.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan keanggotaan Indonesia pada BRICS pada penelitian selanjutnya. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature review bagi peneliti selanjutnya agar menemukan *novelty* yang terbaharukan.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi yang baik secara praktis untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Indonesia dalam keanggotaannya pada aliansi BRICS.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

##### **1.5.1. Tinjauan Pustaka**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis meninjau kembali terkait informasi pada penelitian sebelumnya guna memperkuat dan menemukan novelty dalam membuat penelitian ini. Dengan begitu, penulis mengambil beberapa literatur melalui buku dan jurnal untuk menemukan argumen utama.

Penelitian pertama dari Asep Setiawan (2025) yang berjudul *Indonesia's Joins BRICS: Balancing Economic Opportunities and Geopolitical Challenges in a Multipolar World*. Terdapat argumen utama bahwa Indonesia memandang keanggotaan BRICS sebagai sarana untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi,

mengakses mekanisme keuangan alternatif, dan meningkatkan pengaruhnya dalam tata kelola global.

Namun, keanggotaan ini juga memiliki risiko, termasuk potensi ketegangan diplomatik dengan negara-negara Barat dan tantangan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas aktif” (Setiawan, n.d.). Bisa dikatakan bahwa tinjauan pustaka ini hanya berfokus pada penjelasan tantangan penerapan politik Bebas-Aktif Indonesia dalam membuat keputusan masuk aliansi BRICS.

Penelitian terdahulu selanjutnya dari Tiewa Liu (2014) yang berjudul *Chinese Strategic Culture and the Use of Force: Moral and Political Perspectives*. Pada penelitiannya terdapat argumen utama bahwa menjelaskan sikap Tiongkok terhadap penggunaan kekuatan dalam urusan internasional, terutama dari perspektif budaya strategis. Penulis menelusuri nilai-nilai tradisional yang berasal dari pemikiran Tiongkok kuno dan juga meneliti persepsi Mao Zedong tentang perang, yang mewakili teori strategis militer Tiongkok kontemporer, serta pembahasan Deng Xiaoping dan Hu Jintao tentang perang setelahnya, yang mencerminkan keyakinan pemerintah Tiongkok setelah mengadopsi kebijakan pembukaan dan reformasi. Studi kasus Perang Korea, Perang Vietnam, dan dua Perang Irak lebih lanjut mengeksplorasi prinsip-prinsip yang mendominasi proses pengambilan keputusan diplomatik (Liu, 2014).

Selanjutnya pada penelitian terdahulu ketiga dari W. A. Rivera, PhD (2022) dengan judul *The Strategic Culture of Resistance Iranian Strategic Influence in Its Near Abroad*. Penelitian ini terdapat argumen utama bahwa sejak Revolusi Islam di Iran 1979, budaya strategis perlawanan telah mendominasi tujuan

strategis dan pembentukan preferensi kebijakan luar negeri Iran. Iran adalah negara revisionis yang tidak memiliki dominasi militer dan ekonomi yang mutlak di kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, dua pilar telah muncul untuk mendukung dan mengeksport budaya strategis perlawanan mereka: perlawanan adaptif (pragmatisme) dan redundansi yang dirancang (isolasi dan penyangkalan). Dua tema perlawanan ini memberikan konten dan struktur bagi kampanye pengaruh strategis mereka. Pengaruh strategis adalah cara di mana unsur-unsur budaya strategis perlawanan dieksekusi di kawasan sekitar Iran. Untuk melawan dan mengalahkan kampanye pengaruh strategis, diperlukan pemahaman baik terhadap faktor-faktor budaya strategis yang berperan maupun kampanye pengaruh strategis yang diterapkan Iran (Rivera, 2022.).

Berdasarkan tiga tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa hadirnya BRICS memberikan peluang bagi negara berkembang untuk berkontribusi dalam multipolar global. Artinya terdapat peralihan tatanan dunia unipolar menuju multipolar sehingga tidak hanya sebatas dikuasai oleh negara maju saja, melainkan negara berkembang memiliki andil didalamnya. Selain itu, pada pembahasan kajian Teori Budaya Strategis bahwa suatu negara bisa mengambil keputusan berdasarkan aspek budaya strategis yang ada. Dengan begitu tentu akan menciptakan keputusan yang strategis bagi negara itu sendiri. Melalui tiga tinjauan pustaka ini, terdapat *gap* bahwa kelima tinjauan pustaka tersebut belum ada yang pernah membahas mengenai alasan Indonesia masuk ke dalam aliansi BRICS yang ditinjau melalui Teori Budaya Strategis.

### **1.5.2. Teori Budaya Strategis**

Pada penelitian ini dalam menganalisis motif Indonesia bergabung dalam aliansi BRICS menggunakan Teori Budaya Strategis. Teori budaya strategis merupakan teori yang melihat bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil negara berdasarkan budaya strategis yang terbentuk. Dengan kata lain, bahwa budaya strategis merupakan seperangkat keyakinan yang dipegang oleh para pembuat kebijakan strategis mengenai objek politik perang dan cara paling efektif untuk mencapainya, muncul dari kebutuhan pembuat strategi untuk bertindak dengan sengaja di tengah ketidakpastian. Dalam pembuatan suatu kebijakan bisa dikatakan negara juga mempertimbangkan dari segi aspek budaya sehingga membentuk kebijakan negara, sehingga menghasilkan keputusan yang strategis. Studi tentang budaya strategis adalah alat untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan subyektif yang tak kentara ini dan secara formal menganalisis implikasinya terhadap strategi dan pengejaran kebijakan.

Teori Budaya Strategis awalnya dikemukakan oleh Jack Snyder pada tahun 1977. Menurut Snyder (1977), konsep budaya strategis merupakan perspektif untuk menganalisis bagaimana suatu negara bertindak di hadapan ancaman. Dalam hal ini, faktor-faktor internal suatu negara seperti budaya berpikir, pengalaman masa lalu, keunikan situasi, dan budaya militer merupakan penentu tindakan suatu negara.

Sedangkan menurut Yitzhak Klein (1991) bahwa Teori Budaya Strategis merupakan kumpulan sikap dan keyakinan yang dianut dalam lembaga militer mengenai tujuan politik perang dan strategi serta metode operasional paling efektif

untuk mencapainya (Klein, 1991). Artinya dalam membuat suatu kebijakan, perlunya ada keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok agar tujuan politiknya tercapai secara strategis. Dalam hal ini, menurut Klein teori budaya strategis disini sebenarnya lebih berfokus pada bagaimana instansi militer dalam membuat suatu kebijakan yang berdasarkan sikap dan keyakinan dianut.

Menurut Johnston (1995), budaya strategis merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan bahwa kebijakan suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan rasional atau kondisi material, tetapi juga oleh seperangkat gagasan yang berkembang secara historis suatu negara. Johnston mendefinisikan budaya strategis sebagai suatu sistem simbol (*system of symbol*) yang membentuk asumsi para pembuat kebijakan mengenai hakikat lingkungan strategis serta cara yang dianggap paling tepat (Johnston, 1995). Dengan kata lain, budaya strategis membentuk preferensi strategis yang kemudian mempengaruhi bagaimana suatu negara membuat kebijakan suatu negara.

Berdasarkan pemikiran tersebut, budaya strategis berarti merupakan seperangkat simbol yang membentuk cara pandang negara dalam memahami lingkungan strategis dan menentukan pilihan kebijakan. Oleh karena itu, budaya strategis tidak secara langsung menghasilkan kebijakan, melainkan membentuk preferensi strategis. Preferensi strategis inilah yang membuat suatu negara memutuskan strategis apa yang dipakai dalam membuat suatu kebijakan sesuai dengan budaya strategis yang terbentuk.

Dalam perkembangannya, ada tiga generasi pemikir budaya strategis yang memiliki pemahaman berbeda tentang konsep ini. Pada generasi pertama, budaya

strategis merupakan perspektif untuk menganalisis bagaimana suatu negara berperilaku dalam menghadapi ancaman. Pada generasi kedua, keputusan strategis didasarkan pada sikap keyakinan para pemimpin sedangkan pada generasi ketiga, keputusan strategis didasarkan pada sistem simbol yang berkembang dalam suatu negara. Bisa dikatakan, pada generasi pertama dan kedua lebih berfokus bagaimana instansi militer dapat membuat kebijakan yang strategis, sedangkan generasi ketiga bahwa implementasi teori budaya strategis tidak hanya untuk instansi militer saja, tetapi dalam lingkup negara.

Melalui penelitian ini, setelah membandingkan berbagai pemikiran mengenai Budaya Strategis, penulis memilih menggunakan teori Budaya Strategis dari Alastair Iain Johnston. Pemilihan teori ini didasarkan pada pandangan Johnston (1995) yang menjelaskan bahwa budaya strategis merupakan suatu *system of symbols* yang membentuk asumsi dan preferensi strategis para pembuat kebijakan dalam memahami lingkungan strategis. Preferensi strategis tersebut kemudian memengaruhi proses perumusan kebijakan negara. Dengan demikian, teori Johnston dinilai relevan untuk menjelaskan bagaimana budaya strategis Indonesia membentuk preferensi strategis yang pada akhirnya tercermin dalam keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS.

## **1.6. Operasional Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1. Identitas Nasional**

Identitas nasional merupakan suatu betuk jati diri atau citra bangsa di

kancah internasional. Identitas nasional sangat penting bagaimana suatu negara dalam memposisikan dirinya ketika berada di forum internasional. Identitas nasional sangat berpengaruh pada pembuatan kebijakan suatu negara sehingga menghasilkan kebijakan yang strategis. Identitas nasional juga melihat sejauh mana penerapan identitas nasional dalam forum internasional. Identitas nasional juga merupakan bagian dari persepsi sejauh para pemimpin dapat menggunakan karakteristik budaya dan pengalaman nasional untuk memunculkan perasaan akan nilai-nilai bersama, kepercayaan, patriotisme, dan lain sebagainya (Campbell & Hall, 2009).

#### **1.6.1.2. Pengalaman Sejarah**

Pengalaman sejarah merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh suatu negara sehingga membentuk nilai dan norma dalam membuat suatu kebijakan. Pengalaman sejarah membentuk suatu kebijakan yang strategis karena berdasarkan apa yang pernah terjadi. Pengalaman historis dan preferensi strategis yang berakar pada sejarah cenderung membatasi respons terhadap perubahan dalam lingkungan strategis “objektif”, sehingga mempengaruhi pilihan strategis dengan cara yang unik (Johnston, 1995). Artinya, aktor negara dalam membuat suatu kebijakan tetap ada pertimbangan berdasarkan pengalaman sejarah sehingga terkadang menghambat pembaharuan yang sifatnya tidak sesuai dengan pengalaman sejarah.

#### **1.6.1.3. Nilai**

Nilai merupakan seperangkat keyakinan dan prinsip moral sebagai landasan negara untuk membuat suatu kebijakan. Dengan adanya nilai, negara

melakukan filter kognitif (menyeleksi dan mengarahkan) sekiranya kebijakannya dapat dilaksanakan atau tidak, karena kebijakan yang dibuat harus selaras dengan nilai. Nilai disini fungsinya untuk memberi arah negara dalam membuat suatu kebijakan, sehingga menghasilkan kebijakan yang strategis.

#### **1.6.1.4. Geopolitik**

Geopolitik adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana faktor geografis, sumber daya, dan posisi strategis serta kondisi kekuatan suatu negara membentuk kebijakan luar negeri dan interaksi kekuasaannya dengan aktor lain dalam sistem internasional. Geopolitik tidak hanya tentang pengaruh kawasan, tetapi juga relasi dominasi dan resistensi kekuasaan antar negara. Menurut Snyder dalam Johnston (1995) bahwa budaya strategis yang terbentuk suatu negara berakar dari pengalaman sejarah, budaya politik, dan kondisi geografi, di mana faktor geografis serta posisi geopolitik suatu negara turut membentuk preferensi strategisnya.

### **1.6.2. Definisi Operasional**

#### **1.6.2.1. Identitas Nasional**

Pada penelitian ini, identitas nasional dimaksudkan pada politik Bebas Aktif yang dimiliki oleh Indonesia. Politik bebas aktif disini memiliki fokus yang strategis yakni bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur dalam urusan politik. Dengan begitu, Indonesia memiliki kebebasan untuk masuk ke dalam aliansi BRICS untuk menunjang tujuan nasional yang strategis tanpa terikat dengan aliansi tertentu lainnya.

### **1.6.2.2. Pengalaman Sejarah**

Pada penelitian ini, pengalaman sejarah diintegrasikan pada adanya kesamaan latar belakang Indonesia dengan beberapa negara anggota BRICS yang menjadi negara bekas jajahan Barat (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis). Hal ini memiliki kesamaan oleh negara Afrika Selatan yang pernah dijajah oleh Barat yakni Belanda dan Inggris. Selain itu, kesamaan latar belakang sejarah antara Indonesia dengan negara anggota BRICS yakni pernah memiliki hubungan pragmatis dengan Uni Soviet (sekarang Rusia) di era Ir. Sukarno. Tidak hanya itu saja, kesamaan pengalaman sejarah selanjutnya adalah bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang dihadiri beberapa negara anggota BRICS diantaranya India, Iran, Etiopia, Arab Saudi, dan lain sebagainya.

Konferensi tersebut pada intinya membahas mengenai kerja sama ekonomi antarnegara Asia Afrika, kerja sama budaya, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah rakyat yang masih dijajah, serta perdamaian dunia dan kerja sama internasional. Selain itu dengan adanya pengalaman sejarah karena Indonesia adalah tuan rumah KAA Bandung, Indonesia selalu mengedepankan nilai solidaritas selatan sehingga memberikan narasi bahwa Indonesia adalah *leader of south*. Dengan begitu, melalui faktor pengalaman sejarah ini, Indonesia memiliki persinggungan didalamnya dengan beberapa anggota BRICS.

### **1.6.2.3. Nilai**

Pada penelitian ini, maksud dari nilai adalah bagaimana penerapan nilai dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan untuk masuk ke dalam aliansi BRICS, sejalan dengan beberapa negara anggota karena untuk membatasi dominasi Barat

dalam tatanan dunia sehingga negara berkembang memiliki ruang untuk berkontribusi. Hal ini menunjukkan Indonesia membawa nilai solidaritas *global south* atau semangat solidaritas selatan. Adanya semangat solidaritas selatan ini menjadikan Indonesia sebagai jembatan bagi *global south* dan *global north* agar tidak bisa meminimalisasi ketegangan kekuatan dalam tatanan dunia global.

#### **1.6.2.4. Geopolitik**

Pada pengimplementasiannya, geopolitik disini memiliki kaitan dengan kawasan politik yang dipengaruhi oleh kebijakan elite negara dalam membuat persepsi posisi negara sebagai apa di tatanan dunia. Hal ini berkaitan dengan pelabelan kawasan yakni *global south* dan *global north*. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan bahwa kawasan utara dan selatan memiliki ketimpangan pengaruh politik dan kekuasaan. Bisa dikatakan untuk *global north* istilah untuk negara yang maju dan *global south* adalah negara berkembang. Geopolitik disini memiliki kaitan dengan Indonesia sebagai negara *global south* yang menjadi jembatan kepentingan antara *global south* dan *global north* guna menyeimbangkan tatanan dunia global sehingga menciptakan tatanan yang multipolar.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat argumen utama penulis yakni masuknya Indonesia ke dalam aliansi BRICS karena adanya unsur budaya strategis di dalamnya. Keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam aliansi BRICS dapat dianalisis melalui budaya strategisnya karena terdapat unsur adanya pengalaman sejarah, identitas nasional, nilai sebagai negara selatan yang membawa semangat

solidaritas selatan, dan geopolitik. Selain itu, Indonesia juga memiliki persinggungan secara budaya dengan masing-masing anggota negara BRICS. Dengan begitu, budaya strategis ini dapat mendorong rasa solidaritas dan saling percaya guna memperkuat kekuatan yang strategis dan menyeimbangkan tatanan dunia sehingga dapat berkontribusi didalamnya.

## **1.8. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah pendekatan ilmiah yang difokuskan pada pemahaman mendalam tentang fenomena, persepsi, motivasi, dan konteks sosial dari subjek penelitian. Definisi menurut Menurut Sugiyono (2005), bahwa penelitian kualitatif cenderung cocok untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara singkat, penelitian untuk meneliti kondisi atau situasi dari objek penelitian. Selanjutnya, penelitian kualitatif untuk meneliti hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan perilaku atau sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini termasuk ke dalam kategori eksplanatif karena penelitian ini menjelaskan mengenai hubungan sebab-akibat keputusan Indonesia bergabung dalam aliansi BRICS. Tipe penelitian eksplanatif ini dikemukakan oleh Neuman (2014), penelitian dasar dirancang untuk memajukan pengetahuan fundamental tentang bagaimana dunia bekerja dengan membangun dan menguji penjelasan teoretis melalui fokus pada pertanyaan "*why*", dengan komunitas

ilmiah sebagai audiens utamanya. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Indonesia memutuskan bergabung dalam aliansi BRICS dengan menggunakan teori budaya strategis sebagai kerangka analisis.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian merujuk pada suatu lokasi sosial yang menjadi wadah pelaksanaan penelitian. Menurut Nasution (1988: 43), lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur, yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Dengan demikian, pada penelitian ini, situs penelitian dilakukan di Semarang dengan pengambilan data secara sekunder melalui jurnal terindeks dan website yang memiliki kredibel baik..

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian peneliti, baik berupa individu, benda, maupun peristiwa, yang di dalamnya terdapat variabel penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Menurut Arikunto (2016), subjek penelitian merupakan batasan penelitian yang dapat ditentukan melalui benda, hal, atau orang yang menjadi tempat melekatnya variabel penelitian. Dengan begitu, melalui penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Indonesia dan aliansi BRICS.

### **1.8.4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari pengumpulan langsung di lapangan, melainkan dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya seperti dokumen resmi, berita resmi, dan

lain sebagainya (Creswell, 2014). Dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis, di mana proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan (Ratnaningtyas et al., 2023). Adapun seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yakni data penelitian ini berbentuk narasi, dokumen, dan teks yang dianalisis secara mendalam untuk memahami fenomena sosial-politik yang diteliti (Moleong, 2018). Dengan begitu, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, perjanjian internasional, laporan lembaga, serta berita dan artikel yang relevan dengan fenomena bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi BRICS.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Sumber data yang akan diperoleh data sekunder yang nantinya akan didapat melalui jurnal terindeks Scopus, Sinta, Jstor dan lain sebagainya dengan terjaminnya sumber data tersebut. Selain jurnal, data yang akan didapat melalui *website* yang mendukung seperti Britannica, CNN, CNBC, BBC, BRICS dan lain sebagainya.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data akan dilakukan secara studi pustaka melalui *library research*, *archieval research*, maupun *internet research*. Hal ini juga akan tetap dipertanggungjawabkan tentang kredibilitas dan sumber data yang diperoleh.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis dokumen dan sumber lain serta diidentifikasi dalam kajiannya secara sistematis

terhadap dokumen dan sumber yang relevan dengan topik penelitian (Bowen, 2009). Data yang dianalisis meliputi pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia, dokumen kebijakan luar negeri, laporan lembaga internasional, serta jurnal ilmiah yang memiliki kaitan dengan Indonesia bergabung dalam BRICS atau fenomena internasional yang terjadi dalam dinamika multipolaritas global.

Dalam interpretasi data, dapat dilakukan dengan cara menghubungkan temuan yang ada diperoleh dari analisis dokumen dan data yang memiliki kaitan erat dengan budaya strategis yang digunakan pada penelitian ini. Adanya proses interpretasi memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam yang berkaitan dengan logika dan pertimbangan yang melatarbelakangi dari penelitian tersebut sehingga menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan interpretatif (Creswell, 2014).

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Kualitas data dalam penelitian ini akan didapat melalui analisis secara mendalam mengenai kredibilitas dari sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian ini yakni alasan Indonesia masuk ke dalam aliansi BRICS.